

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Di dalam Pancasila terdapat sebuah makna yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan bernegara salah satunya adalah keadilan sosial. Makna yang terkandung dalam keadilan sosial tersebut mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat secara umum termasuk keadilan dalam perekonomian. Demi tercapainya suatu keadilan perekonomian ini diwujudkan dalam undang-undang yang mengatur tentang perekonomian. Adapun undang-undang yang mengatur hal tersebut adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 1992 Tentang Koperasi menjelaskan bahwa koperasi sebagai pilar perekonomian nasional memiliki karakteristik sebagai berikut (Kemenkeu, 1992):

1. Koperasi adalah badan usaha yang terdiri dari orang dan melakukan kegiatan usaha sebagai badan usaha lainnya dengan memanfaatkan semua kemampuan anggotanya.
2. Kegiatan koperasi didasarkan pada prinsip-prinsip koperasi, yaitu, keanggotaan bersifat sukarela, manajemen dilakukan secara demokratis, dan distribusi sisa hasil operasi (Sisa Hasil Usaha = SHU) dilakukan secara proporsional dengan sejumlah layanan bisnis dari masing-masing anggota.
3. Koperasi adalah gerakan ekonomi rakyat berdasarkan prinsip kekeluargaan. Dalam tatanan ekonomi koperasi Indonesia adalah salah satu kekuatan

ekonomi yang tumbuh di antara masyarakat luas sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan prinsip kekerabatan.

4. Koperasi Indonesia bertujuan untuk mensejahterakan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Keberadaan koperasi di Indonesia tidak terlepas dari konsep ekonomi kerakyatan yang didorong oleh para pendiri Indonesia, yaitu sistem ekonomi yang berpihak pada penduduk asli, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang ditandai dengan kehidupan masyarakat (Suyono, 2016). Koperasi Unit Desa (selanjutnya disebut KUD) adalah jenis usaha yang mengawasi berbagai bidang usaha, seperti fasilitas produksi pertanian, perdagangan, tabungan dan pinjaman, dan sebagainya. Jenis bisnis ini telah berlangsung lama di Indonesia dan manfaatnya telah dirasakan oleh masyarakat luas dan berkontribusi dalam menyediakan lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian negara. Jenis bisnis ini telah berlangsung lama di Indonesia dan manfaatnya telah dirasakan oleh masyarakat luas serta berkontribusi dalam menyediakan lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian negara (Riswan, 2017). Selain itu, koperasi adalah jenis badan usaha yang diberi mandat berdasarkan konstitusi Negara Indonesia, yaitu, Undang-Undang Dasar 1945.

Selain keadilan, masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai permusyawaratan. Dari keadaan tersebut, terdapat system yang sangat cocok dengan iklim sosial sebagai realisasi keadilan sosial dalam perekonomian Indonesia yaitu dengan system Koperasi. Koperasi merupakan badan yang dibentuk dengan prinsip ekonomi kerakyatan yang tidak membedakan agama

bahkan suku serta dibentuk atas dasar kesukarelaan. Penjelasan koperasi diterangkan sebagai kumpulan orang-orang, persamaan derajat, kesukarelaan, dan tanggung jawab bersama (Hendrojogi, 2002).

Indonesia umumnya digambarkan sebagai Negara Berkembang dan sekitar 58 persen penduduknya tinggal di daerah pedesaan. Pada tahun 1997, (tahun di mana angka terbaru tersedia) total populasi Indonesia (negara dengan populasi keempat di dunia) adalah sekitar 200,1 juta orang. Ini berarti bahwa sekitar 116,06 juta orang tinggal di daerah pedesaan. Secara umum, wilayah ini ditandai dengan gaya hidup tradisional berbasis pertanian. Dari sudut pandang ekonomi, dibandingkan dengan sektor lain, sektor pertanian telah memberikan kontribusi total terkecil untuk Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia (Santoso, 2012).

Pengembangan ketahanan pangan adalah masalah yang sangat penting dan strategis, bagi eksistensi kedaulatan suatu bangsa, di samping masalah ketahanan energi dan air, dan beberapa (Pangan, Energi, dan Air). Karenanya, ketahanan pangan adalah salah satu orientasi pembangunan nasional kami. Master Plan untuk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025, yang diluncurkan pada Mei 2011 yang menyatakan bahwa tema pembangunan ekonomi Indonesia adalah "posisi Indonesia sebagai dasar ketahanan pangan dunia, pusat pengolahan produk pertanian, perkebunan, perikanan, sumber daya mineral dan energi dan pusat mobilitas logistik global " (Rahmawati, 2014).

Secara khusus, koridor ekonomi Papua-Kepulauan Maluku berorientasi sebagai "Pusat Pengembangan Pangan, Perikanan, Energi dan Pertambangan

Nasional". Ada beberapa hal yang menyebabkan krisis pangan di Indonesia, khususnya di Indonesia Timur, salah satunya adalah kebutuhan pangan masyarakat Indonesia yang tumbuh dari hari ke hari dengan rata-rata 132 kg / kapita / tahun beras. (Rahmawati, 2014).

Di sisi lain produksi beras nasional berjumlah 69,8 juta ton pada 2010 sementara tingkat kebutuhan 71,8 juta ton kondisi ini, permintaan beras (minus) - 3,06 juta ton ini disebabkan karena masyarakat masih mengandalkan konsumsi makanan utama seperti nasi. Hal ini juga disebabkan belum optimalnya upaya diversifikasi makanan lokal sebagai makanan utama di Indonesia Timur. Masalah lainnya adalah bagian timur Indonesia, ada beberapa pulau kecil yang terisolasi di wilayah perbatasan yang menentukan kedaulatan wilayah tersebut, tetapi lebih berorientasi ke negara tetangga.

Tentunya, kurangnya infrastruktur terutama sistem transportasi tidak dapat mendukung produksi, pengolahan, pemasaran dan distribusi di bagian timur kepulauan Indonesia terutama karena konektivitas yang menuntut antar pulau. Karena itu dibutuhkan bandara, pelabuhan umum, pelabuhan perikanan dan jalur transportasi darat, yang masih sangat terbatas. Kurangnya fasilitas transportasi juga berdampak pada ketersediaan energi untuk Indonesia bagian timur (Rahmawati, 2014).

Ketika krisis moneter mengikuti krisis ekonomi dan pengesampingan politik pada tahun 1998, unit koperasi desa (KUD) dan koperasi pada umumnya menjadi pendulum keselamatan ekonomi nasional yang sangat berarti. Namun, tindak lanjut fenomena ekonomi pascakrisis yang banyak berdampak pada krisis politik,

mengarah pada adanya dampak KUD tekanan eksternal dan internal yang cukup berat (Rahmawati, 2014).

Keberadaan koperasi di setiap kabupaten memiliki arti atau peran yang sangat penting dan bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan untuk meningkatkan pendapatan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan prinsip keadilan sosial. Awalnya, koperasi dibentuk sebagai tolak ukur bagi perekonomian Indonesia yang lebih berporos dalam sistem ekonomi kerakyatan. Tetapi dengan era globalisasi yang semakin terbuka, banyak koperasi tidak mampu bersaing sehingga beberapa koperasi tersebut tidak ada lagi. Ini karena fakta bahwa banyak koperasi tidak mampu mengatasi berbagai masalah bisnis di tengah-tengah lingkungan bisnis yang kompetitif sehingga mereka tidak dapat berkembang dalam lingkungan yang semakin kompetitif untuk melakukan bisnis tersebut. Sementara itu, peran koperasi akan semakin parah terutama dalam menghadapi era Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) tahun 2020 (Suyono E. , 2019).

Sementara menjadi salah satu krisis pangan pokok yang sedang dialami oleh ekonomi pedesaan negara kita adalah lembaga-lembaga yang lemah, yang pada gilirannya berdampak pada kecenderungan produksi, serta kelemahan sistem distribusi. Momentum pengesahan Koperasi dan Undang-Undang Pangan oleh Parlemen dapat menjadi dasar untuk revitalisasi koperasi. Di KUD dulu, kelemahan yang ada tentu saja berhasil memainkan peran itu. Paling tidak, KUD menjadi perantara bagi petani untuk mendapatkan kredit pertanian melalui perbankan mikro pedesaan, distribusi input pertanian, pemrosesan pertanian dan

pemasaran. Sebagai salah satu contoh efektivitas koperasi dalam mendukung ketahanan pangan, pada tahun 1982 KUD berhasil pengadaan sebanyak 1,9 juta ton beras, setara dengan kemampuan Agensi Logistik Indonesia (Rahmawati, 2014).

Pada akhir era pembangunan lima tahun keenam (1996/1997), pertanian menyumbang sekitar 16,1 persen dari PDB Indonesia, sektor-sektor lain seperti sektor industri menyumbang sekitar 43,9 persen, dan sektor jasa sekitar 40,1 persen (Bank Dunia 1998a). Terlepas dari kontribusinya yang kecil terhadap PDB Indonesia, sektor pertanian telah menjadi pemberi kerja terbesar bagi orang-orang yang sebagian besar tinggal di daerah pedesaan (Santoso, 2012).

Kehadiran koperasi sangat berperan dalam Negara yang sedang berkembang seperti Indonesia sebagai stimulan terhadap berkembangnya struktur perekonomian agar menjadi lebih kokoh. Masyarakat memerlukan koperasi sebagai jembatan untuk memobilisasi status ekonomi agar menjadi lebih mapan (Suyono, 2016).

DFDI pada tahun 2010 melakukan penelitian di negara-negara berkembang yang meliputi Kenya, Uganda, Bangladesh, Tanzania, Nigeria, Rwanda, Malawi, Palestina dan sebagainya. Secara umum, DFDI telah berhasil merevitalisasi koperasi di negara-negara tersebut. Data menunjukkan bahwa koperasi yang diamati di seluruh negeri berhasil mempekerjakan lebih dari 100 juta orang miskin. Koperasi dapat membantu pasar bekerja lebih baik bagi orang miskin untuk mengelola sektor informal dalam mendukung mata pencaharian, mengamankan akses ke sumber daya bagi petani, mengolah bahan mentah

menjadi produk yang lebih menguntungkan, dan memperluas akses ke lembaga keuangan (Suyono E. , 2019).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Departemen Koperasi, perkembangan koperasi mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Dengan perkembangan tersebut dapat dikatakan bahwa Indonesia mengalami kemajuan dalam bidang perkoperasian. Data tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut (Statistik, Perkembangan Koperasi tahun 2013-2016, 2016):

Tabel 1. 1

Daftar Perkembangan Koperasi tahun 2013-2016

Tahun	Jumlah Koperasi Aktif (Unit)	Permodalan (Rp Juta)	Volume Usaha (Rp Juta)	Selisih Hasil Usaha (Rp Juta)
2013-2014	230701	170376863	125584976	8110179
2014-2015	209488	200662816	189858671	14898647
2015-2016	212135	242445395	266134619	17320663

Sumber : Badan Pusat Statistik (2016)

Berbagai sektor usaha dapat dikembangkan lewat koperasi seperti koperasi konsumsi, produksi, dan lainnya. Pada koperasi produksi terdapat berbagai jenis salah satunya adalah pada sektor pertanian. Sektor pertanian yang berkembang akan membantu pembangunan perekonomian masyarakat ditengah kepadatan penduduk dan perkembangan pada sektor pertanian yang akan mengatasi permasalahan pendapatan rata-rata masyarakat. Selain itu, perkembangan dari segala sektor dapat membuka lapangan pekerjaan baru dan diharapkan dapat mengurangi masalah pengangguran di Indonesia.

Indonesia merupakan negara yang memiliki produk pertanian terbesar, hasil pertanian di Indonesia meliputi komoditas hortikultura, tanaman pangan, dan perkebunan. Penyumbang hasil pertanian terbesar salah satunya yaitu pada komoditas hortikultura. Mengemukakan bahwa Indonesia memiliki iklim yang baik sehingga menjadikannya sebagai salah satu produsen penghasil buah-buahan terbesar yang lebih dikenal dengan sebutan buah-buahan tropis. Buah-buahan termasuk dalam kelompok hortikultura yang pengembangannya mendapat perhatian pemerintah. Kebijakan pengembangan buah di Indonesia dilakukan berdasarkan pertimbangan nilai ekonomis, keunggulan komparatif, dan kesesuaian agroklimat, agribisnis serta agro industry (Astawan, 2007).

Pengembangan pangan dan gizi adalah upaya pengembangan lintas bidang dan sektor yang saling terkait, yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat secara adil dan merata baik secara kuantitas maupun kualitas gizi. Secara khusus, pengembangan pangan adalah upaya mengembangkan sistem pangan yang andal. Pengembangan di bidang pangan harus diarahkan pada upaya peningkatan swasembada yang tidak hanya berorientasi pada beras dan gandum saja, tetapi didukung pula oleh jenis komoditas strategis lokal. Dengan demikian kita menjadi ketahanan pangan yang berkelanjutan. Pengembangan ketahanan pangan adalah masalah yang sangat penting dan strategis, bagi eksistensi kedaulatan suatu bangsa, di samping masalah ketahanan energi dan air, dan beberapa (Pangan, Energi, dan Air). Karenanya, ketahanan pangan adalah salah satu orientasi pembangunan nasional (Rahmawati, 2014).

Master Plan untuk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025, yang diluncurkan pada Mei 2011 yang menyatakan bahwa tema pembangunan ekonomi Indonesia adalah "posisi Indonesia sebagai dasar ketahanan pangan dunia, pusat pengolahan produk pertanian, perkebunan, perikanan, sumber daya mineral dan energi dan pusat mobilitas logistik global". Hal tersebut menjelaskan bahwa perlu adanya perhatian khusus mengenai pengembangan pengolahan produk pertanian sebagai batu loncatan untuk mengadakan percepatan perluasan pembangunan di Indonesia. Koperasi bisa menjadi suatu komoditas pengembangan pengolahan produk pertanian dimana masyarakat dihimpun dan diberikan sebuah fasilitas yang bernilai dan berkelanjutan seperti fasilitas produksi dan pelatihan guna menunjang produktifitasnya nanti pada saat masyarakat tersebut bisa memproduksi (Rahmawati, 2014).

Berdasarkan data Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian (Disperindagkoptan) Kota Yogyakarta memiliki 554 koperasi. Namun dari jumlah tersebut, 98 koperasi pasif. Salah satu Koperasi yang masih aktif di Yogyakarta yaitu Koperasi "AMBOY" (Agro Mirasa Boga Bantul Yogyakarta) di Desa Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, Yogyakarta.

Koperasi ini merupakan usaha dibidang olahan makanan hasil pertanian non gandum. Pengolahan minuman dan makanan adalah produk yang banyak diminati dan memiliki daya serap pasar cukup tinggi (Martauli et al, 2016). Hal tersebut menyebabkan adanya koperasi yang bergerak di bidang pengolahan makanan yang dapat menambah profit bagi masyarakat. Koperasi "AMBOY" dibentuk oleh

lembaga petani, forum bisnis petani, gapoktan dan Forum Organisasi Petani Bantul pada tanggal 19 April 2012 di BKP3 Kabupaten Bantul. Masyarakat Desa Sidomulyo mayoritas bekerja sebagai petani pisang.

Menurut Profil Desa dan Kelurahan Desa Sidomulyo 2017 produktifitas tanaman pisang di Desa Sidomulyo mencapai 250 ton pertahun. Dari jumlah tersebut masih banyak Petani di Desa Sidomulyo yang menjual dalam bentuk mentah. Penghasilan yang didapat dari tanaman pisang sangat sedikit bahkan belum dapat memenuhi kebutuhan hidup. Untuk menambah perekonomian keluarga, petani pisang di Desa tersebut memilih bergabung dengan Koperasi “AMBOY”. Dengan bergabung di Koperasi tersebut petani bisa belajar mengolah pisang menjadi berbagai macam olahan yang bisa menambah nilai jual pisang (Yogyakarta, 2014).

Firman Allah swt yang dituangkan dalam Al Quran menyeru kepada manusia untuk saling menolong dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, manusia dianjurkan untuk tolong menolong dalam hal kebaikan. Ayat Al Quran yang membahas tentang tolong menolong terdapat pada Surat Al Maidah ayat 2 yang berbunyi:

يُدُّ الْعِقَابُ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدٌ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “.....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. (QS. Al-Maidah: 2) (RI, 2002)

Dalam koperasi, musyawarah merupakan hal yang terpenting dalam memutuskan suatu langkah. Dalam Al Quran sudah tertuang tentang musyawarah

yaitu pada Surat Ali Imran ayat 159 yang artinya *“Maka disebabkan rahmat dari Allahlah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu...”*. Secara redaksi, ayat ini memerintahkan manusia untuk memusyawarahkan segala sesuatu dengan manusia lain. Dalam konteks koperasi, musyawarah dilakukan antar anggota. Hal tersebut sangat penting karena musyawarah merupakan keputusan tertinggi dalam sebuah koperasi (TafsirWeb, 2019).

Indicator keberhasilan sebuah koperasi terletak pada system pengelolaan yang baik. Pengadaan koperasi tentunya memiliki tujuan sebagai jembatan masyarakat dalam memandirikan perekonomian. Dengan adanya koperasi disertai dengan system pengelolaan yang baik tentu akan membawa dampak yang signifikan terhadap pengembangan usaha.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Koperasi “AMBOY” (Agro Mirasa Boga Bantul Yogyakarta) terhadap pengembangan usaha anggota?
2. Bagaimana system pengelolaan Koperasi “AMBOY” (Agro Mirasa Boga Bantul Yogyakarta) dalam mengembangkan usaha anggota?
3. Bagaimana kelayakan usaha Koperasi “AMBOY”?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis peran Koperasi “AMBOY” (Agro Mirasa Boga Bantul Yogyakarta) terhadap pengembangan usaha anggota.
2. Menganalisis system pengelolaan Koperasi “AMBOY” (Agro Mirasa Boga Bantul Yogyakarta) dalam mengembangkan usaha usaha anggota.
3. Menganalisis kelayakan usaha Koperasi “AMBOY”.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah daerah DIY, penelitian ini dapat dijadikan rujukan dan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan di bidang perkoperasian khususnya pada anggota.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan pengelolaan khususnya petani pisang dan bahan evaluasi dalam upaya peningkatan produksi.
3. Bagi peneliti, penelitian ini dapat dijadikan referensi dan pengetahuan dasar dalam melakukan penelitian lanjutan khususnya dalam pengembangan koperasi produksi pada anggota.